

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS  
WILAYAH****(Studi Kasus Di Kota Bandung)**Dhiapari Mahesa Lubis<sup>1</sup>Danny Permana<sup>2</sup>Rira Nuradhawati<sup>3</sup>*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi : theaphary78@gmail.com

**Abstrak**

Menangani konflik sosial telah menjadi masalah strategis yang harus ditangani oleh pemerintah daerah untuk mencapai stabilitas regional yang diinginkan. Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak kebal terhadap tantangan-tantangan ini. Konflik sosial di daerah ini sering dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam stabilitas dan ketertiban umum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola konflik sosial dan bagaimana strategi-strategi ini berkontribusi dalam mencapai stabilitas regional. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan teknik pengumpulan data termasuk wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dokumentasi, dan observasi. Data dikumpulkan dari Pemerintah Kota Bandung dan literatur yang relevan. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya yang melibatkan dialog komunitas, partisipasi publik, dan kebijakan inklusif, efektivitas strategi-strategi ini tetap suboptimal. Hambatan utama termasuk keterbatasan kapasitas kelembagaan, kendala anggaran, serta tantangan koordinasi dan budaya. Partisipasi masyarakat telah terbukti krusial dalam mendukung strategi manajemen konflik, dengan menekankan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Rekomendasi dari studi ini mencakup penguatan kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal, serta memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan konflik. Meningkatkan kapasitas institusi dan pendidikan publik juga diperlukan untuk memperkuat manajemen konflik dan partisipasi aktif. Pendekatan yang fleksibel dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat mengatasi ketidaksetaraan sosial, sementara mempromosikan budaya perdamaian dapat memperkuat hubungan komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Bandung mencapai stabilitas regional yang berkelanjutan dan mengelola konflik sosial secara efektif.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

**Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Manajemen Konflik Sosial, Stabilitas Regional.**

### ***Abstract***

*Handling social conflicts has become a strategic issue that local governments must address to achieve desired regional stability. Bandung, as one of the major cities in Indonesia, is not immune to these challenges. Social conflicts in this area are often triggered by various factors, including social, economic, and cultural differences, which, if not managed well, can threaten stability and public order. This study aims to analyze in-depth the strategies implemented by the Bandung City Government in managing social conflicts and how these strategies contribute to achieving regional stability. The research employs a qualitative methodology, with data collection techniques including in-depth interviews, literature review, documentation, and observation. Data were gathered from the Bandung City Government and relevant literature. The findings reveal that despite efforts involving community dialogue, public participation, and inclusive policies, the effectiveness of these strategies remains suboptimal. Main obstacles include limitations in institutional capacity, budget constraints, as well as coordination and cultural challenges. Community participation has proven crucial in supporting conflict management strategies, emphasizing active involvement from various parties. Recommendations from this study include strengthening collaboration between the government, NGOs, the private sector, and local communities, as well as utilizing technology for conflict monitoring and reporting. Enhancing institutional capacity and public education is also necessary to bolster conflict management and active participation. A flexible approach and economic empowerment are expected to address social inequalities, while promoting a culture of peace can strengthen community relationships. These measures are anticipated to help the Bandung City Government achieve sustainable regional stability and effectively manage social conflicts.*

***Keywords: Local Government Strategy, Social Conflict Management, Regional Stability.***

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan ke majemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya, agama dan kepercayaannya. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian jati diri, pengelolaan serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif (*negative stereotyping*) antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan konflik yang berakibat pada merenggangkan ikatan solidaritas sosial.

Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya, agama dan kepercayaan. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta mengandung perbedaan sifat yang sangat tajam secara horisontal dan vertikal, sehingga menunjukkan adanya polarisasi. Hal tersebut menjadikan perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi sosial dapat menjadi faktor penyebab timbulnya konflik di masyarakat yang dapat menimbulkan banyak kerugian termasuk korban jiwa maupun harta benda yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Terlebih di tengah arus globalisasi yang melanda, Indonesia dihadapkan pada transformasi sosial yang sangat signifikan dan luas. Kehadiran ideologi, budaya, dan teknologi asing telah memberikan dampak yang mencolok pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.<sup>1</sup> Budaya lokal dan nasional kini terancam oleh dominasi budaya global, populer, dan universal yang semakin merata. Hal ini telah menyebabkan penurunan sikap toleransi, kehilangan semangat gotong royong, pergeseran nilai-nilai sopan santun, serta kerapuhan etika di tengah-tengah masyarakat.

Semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, jiwa pengorbanan, dan semangat kebangsaan mengalami penurunan yang berdampak pada solidaritas dan persatuan sebagai bangsa Indonesia.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Generasi muda Indonesia saat ini cenderung kehilangan pemahaman akan sejarah, kurang menghargai keberagaman budaya dan tradisi, serta kurang peduli terhadap nilai-nilai perjuangan para "*founding fathers*". Generasi milenial yang sering di sebut sebagai "generasi jaman now", cenderung terjebak dalam sikap yang pragmatis, menginginkan segala sesuatu dengan cepat, dan kehilangan arah nilai moral. Ditambah dengan meningkatnya intoleransi, keberadaan kelompok radikal, ancaman terorisme, dan semakin kuatnya gerakan separatisme, semakin menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Struktur masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan bahasa sangat rentan terhadap konflik sosial, kekerasan massal, dan kerusuhan. Ketegangan politik yang semakin meningkat akibat pergeseran dinamika demokrasi dapat memecah belah masyarakat berdasarkan pilihan politik, terutama menjelang dan setelah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2024, sehingga menimbulkan potensi kerentanan terhadap konflik sosial yang lebih besar.

Salah satu wilayah Indonesia yang rentan terjadinya konflik sosial adalah Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung, mengingat kompleksitas keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang hidup berdampingan. Keanekaragaman ini merupakan aset yang berharga, namun juga dapat menjadi sumber potensi konflik sosial. Konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik dapat mengancam stabilitas wilayah dan menghambat pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bandung telah mengalami berbagai insiden konflik sosial, mulai dari permasalahan antar kelompok masyarakat, bentrokan massa, hingga isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memiliki strategi penanganan yang efektif dan komprehensif agar konflik-konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas dan merugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial, yang dapat menjadi modal dasar kekuatan ketika menghadapi konflik sosial yang terjadi, maupun yang terkait dengan peran para aktor dalam meresolusi konflik di Kota Bandung, dengan menggali dan menganalisis informasi-informasi secara mendetail dari para

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pihak-pihak terkait dengan topik penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang - dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tematis yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2012: 4).

Rancangan penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, komunitas, lembaga masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997: 63). Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam terhadap narasumber terkait, yaitu pejabat pemerintahan Kota Bandung dan juga ditopang dengan studi kepustakaan, dokumentasi dan observasi yang berkorelasi dengan tinjauan pustaka.

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan kunci di daerah penelitian yang terdiri atas individu-individu yang terkait secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1992:32-33). Untuk panduan wawancara dibuat pedoman wawancara berupa sejumlah pertanyaan yang terkait dengan masalah penelitian (Dedy Mulyana, 2002: 59-60). Untuk memperkaya informasi dan data lapangan sekaligus untuk akurasi data, dilakukan penelusuran dan telaahan kepustakaan, baik berupa buku literatur, dokumen termasuk hasil penelitian.

Hasil kajian yang diperoleh melalui metode ini dipaparkan secara deskriptif analitis dan didukung dengan data sekunder yang berfokus pada pemahaman akan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Demi mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, peneliti telah menyusun panduan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada empat kategori narasumber sebagai subjek penelitian. Upaya analisis data dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran mengenai data-data primer dan sekunder yang sudah terkumpul, dengan didasarkan pada kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan pada bab 2. Data yang ditemukan dalam penelitian ini coba dicek kebenarannya dari berbagai sumber. Dan ketika terdapat data yang berbeda antara satu sumber

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

dengan sumber lainnya, peneliti mencari sumber lain yang mendukung salah satunya.

### **KERANGKA TEORI**

Dalam konteks dinamika sosial yang terus berkembang, Kota Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial tidak luput dari tantangan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Oleh karena itu, pengembangan strategi penanganan konflik sosial menjadi imperatif dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka

pemikiran ini, fokus tertuju pada Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah (Studi Kasus Di Kota Bandung). Melalui kolaborasi yang erat dan koordinasi yang efektif, diharapkan mampu menjawab tantangan konflik sosial dengan tepat dan memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi konkret yang mampu mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga stabilitas wilayah Kota Bandung melalui penanganan konflik sosial secara sinergis.

#### **Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga penelitian tersebut menjadi obyektif, rasional dan faktual. Guna memperoleh keterangan dan fakta-fakta secara lengkap, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana yang disampaikan oleh Sukmadinata (2013) yaitu terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian “observasi, wawancara dan dokumentasi”.

#### **Analisis Data.**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara naratif terkait Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah (Studi Kasus Di Kota Bandung). Pentahapan analisis dilakukan sebagaimana menurut Sugiyono (2017), yaitu analisis sebelum memasuki lapangan, meliputi kegiatan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian yang ada bersifat sementara dan akan diuji oleh peneliti saat memasuki dan selama berada di lapangan. Analisis selama di Lapangan, meliputi kegiatan :

1. Pengumpulan Data. Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*Reduction Data*). Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Display Data*). Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

4. Verifikasi dan menarik kesimpulan. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan adalah hasil yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **PEMBAHASAN**

Efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan konflik sosial. Konflik sosial merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Kota Bandung, sebagai kota yang dihuni oleh populasi yang beragam secara etnis,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

budaya, dan agama, memiliki potensi konflik sosial yang dapat timbul dari perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan ekonomi, hingga masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik sosial secara efektif. Efektivitas strategi tersebut tidak hanya dinilai dari kemampuan pemerintah dalam meredam gejolak konflik, tetapi juga dari upaya membangun dialog antar komunitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Pemerintah

Kota Bandung melalui berbagai lembaga terkait telah mengimplementasikan metode dan strategi yang komprehensif untuk mengidentifikasi jenis-jenis konflik sosial yang terjadi di wilayahnya. PJ Walikota Bandung menjelaskan bahwa identifikasi konflik sosial dilakukan melalui pemantauan berkala yang melibatkan laporan dari aparat keamanan, survei masyarakat, dan umpan balik dari berbagai lembaga sosial. Komunikasi aktif dengan organisasi masyarakat dan komunitas lokal juga menjadi faktor kunci dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai potensi dan jenis konflik sosial yang ada. Untuk mendukung langkah ini, tim khusus di bawah naungan Kesbanglinmas dilibatkan dalam analisis data serta penyusunan strategi penanganan konflik yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Sedangkan menurut Kepala Kesbanglinmas Kota Bandung menjelaskan bahwa Kesbanglinmas memanfaatkan data dari laporan masyarakat, observasi langsung, serta bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi potensi konflik, seperti ketimpangan sosial, isu ekonomi, dan dinamika politik lokal. Kesbanglinmas juga aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menangani konflik secara proaktif. Sementara itu, para tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menyampaikan pandangan mereka yang menekankan pentingnya peran serta semua pihak dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana. Pandangan ini menunjukkan keselarasan antara upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan di Kota Bandung.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan-pendekatan yang telah diuraikan, Pemerintah Kota Bandung menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengidentifikasi dan menangani konflik sosial. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimana Ketua DPRD Kota Bandung, menjelaskan bahwa DPRD berperan dalam memberikan masukan dan mengawasi proses perumusan strategi. DPRD sering mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kota dan stakeholder lainnya untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi penanganan konflik. Selain itu, DPRD juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perumusan strategi, memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara Kepala Kesbanglinmas Kota Bandung, menguraikan proses teknis yang dilakukan oleh Kesbanglinmas dalam perumusan strategi penanganan konflik. Kesbanglinmas melakukan kajian menyeluruh tentang faktor-faktor penyebab konflik dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, mereka berkolaborasi dengan aparat keamanan dan lembaga lainnya untuk merancang rencana aksi yang mencakup langkah-langkah pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi. Pelatihan dan workshop juga diadakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik secara damai.

Sementara itu, para tokoh masyarakat dan tokoh agama turut memberikan pandangan mereka yang menekankan pentingnya peran serta semua elemen masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kerukunan dan menyelesaikan konflik secara bijaksana dan damai. Mereka menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif dari semua pihak adalah kunci untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam penanganan konflik sosial.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan strategi penanganan konflik sosial di Kota Bandung melibatkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak dan memanfaatkan data serta analisis yang mendalam. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan, dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat di Kota Bandung.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024***Penguatan Kolaborasi Antar Stakeholder**

Mengefektifkan strategi penanganan konflik sosial membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Bandung dapat memperkuat forum-forum komunikasi yang sudah ada, dengan melibatkan lebih banyak pihak dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas akademik, LSM, dan tokoh agama. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkaya perspektif dalam memahami konflik, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah.

**Penggunaan Teknologi untuk Deteksi Dini Konflik.**

Pemanfaatan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam mengefektifkan penanganan konflik sosial. Pemerintah Kota Bandung dapat mengembangkan sistem pemantauan berbasis data yang memanfaatkan media sosial, laporan warga, dan analisis big data untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Dengan adanya sistem deteksi dini ini, intervensi dapat dilakukan lebih cepat sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar.

**Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam Manajemen Konflik.**

Peningkatan kapasitas adalah kunci dalam mengefektifkan strategi penanganan konflik. Pemerintah Kota Bandung perlu terus memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam hal mediasi konflik dan resolusi damai. Selain itu, masyarakat juga harus diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keterlibatan aktif dalam penyelesaian konflik di tingkat komunitas.

**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi.**

Partisipasi masyarakat dalam strategi penanganan konflik harus ditingkatkan agar lebih inklusif dan representatif. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga dalam setiap tahap penanganan konflik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan memberikan rasa kepemilikan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

(*sense of ownership*) yang lebih kuat terhadap solusi yang dihasilkan. Transparansi dalam proses ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi warga, sehingga meminimalisir ketidakpercayaan dan potensi resistensi.

### **Fleksibilitas dan Adaptasi Strategi.**

Seperti yang diungkapkan oleh Faulkner dan Johnson dalam teori strategi, pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam strategi tidak dapat diabaikan. Pemerintah Kota Bandung perlu mengembangkan strategi yang adaptif, yang dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Bandung. Mekanisme evaluasi dan umpan balik yang terstruktur dan berkala harus diimplementasikan untuk menilai efektivitas strategi yang ada, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan secara cepat dan tepat.

### **Penerapan Pendekatan Holistik dan Interdisipliner.**

Pendekatan holistic dan interdisipliner diperlukan untuk menangani konflik sosial yang sering kali bersifat kompleks dan multidimensi. Strategi penanganan konflik tidak hanya dapat difokuskan pada aspek keamanan, tetapi juga harus mencakup pendekatan kultural, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

### **Pemberdayaan Ekonomi sebagai Bagian dari Strategi Penanganan Konflik.**

Banyak konflik sosial yang berakar dari ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dalam strategi penanganan konflik. Program-program pemberdayaan ekonomi yang ditargetkan kepada kelompok rentan atau yang terlibat dalam konflik dapat mengurangi potensi konflik dengan memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan menciptakan peluang bagi kesejahteraan bersama.

### **Promosi Budaya Damai melalui Pendidikan dan Media.**

Promosi budaya damai perlu digalakkan melalui pendidikan formal

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

dan non-formal, serta kampanye melalui media massa dan media social Pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai toleransi, keragaman, dan resolusi damai harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, serta didukung oleh kampanye publik yang efektif. Hal ini akan membantu membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian dan kerukunan sosial.

### **Peningkatan Infrastruktur Sosial.**

Infrastruktur sosial, seperti pusat-pusat komunitas, ruang publik, dan fasilitas pendidikan, dapat berfungsi sebagai wadah untuk membangun interaksi positif antar kelompok masyarakat. Pemerintah Kota Bandung dapat berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur sosial yang mendorong interaksi antar kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi prasangka dan potensi konflik.

### **Pendekatan Berbasis Data dalam Pengambilan Keputusan.**

Pemerintah Kota Bandung harus mengadopsi pendekatan berbasis data dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait penanganan konflik sosial. Penggunaan data yang akurat dan analisis yang mendalam akan memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan. Data juga penting dalam proses evaluasi untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan strategi penanganan konflik sosial guna mencapai stabilitas wilayah yang diinginkan Stabilitas wilayah merupakan salah satu prasyarat utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di sebuah kota, termasuk Kota Bandung. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya, Bandung kerap dihadapkan pada potensi konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas wilayah. Konflik sosial, yang dapat timbul dari berbagai faktor seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan perbedaan ideologi,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

jika tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung telah merumuskan dan menerapkan berbagai strategi untuk menangani konflik sosial dengan tujuan mencapai stabilitas wilayah yang diinginkan.

Namun, implementasi strategi penanganan konflik sosial ini tidaklah mudah. Pemerintah Kota Bandung dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks, yang sering kali menghambat efektivitas upaya tersebut. Hambatan-hambatan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek struktural, kultural, serta sosial-ekonomi. Sementara tantangan-tantangan yang ada sering kali muncul dari dinamika sosial yang cepat berubah, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kota. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah keterbatasan kapasitas institusional dalam menangani konflik sosial. Keterbatasan ini dapat terlihat dari kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam mediasi dan resolusi konflik.

Meskipun berbagai lembaga dan organisasi telah dibentuk untuk menangani konflik sosial, sering kali terjadi tumpang tindih fungsi dan peran yang mengakibatkan tidak efektifnya implementasi strategi yang telah dirumuskan. Selain itu, proses birokrasi yang lambat dan rumit sering kali memperlambat respons pemerintah terhadap situasi konflik yang memerlukan penanganan cepat dan tepat.

Hambatan lainnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Strategi penanganan konflik sosial memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk program pencegahan maupun penanganan pasca konflik.

## **KESIMPULAN**

Efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan konflik sosial. Efektivitas strategi penanganan konflik sosial yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung menunjukkan pencapaian yang bervariasi. Meskipun

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

pemerintah telah mengadopsi pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan institusi, regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan. Strategi yang ada saat ini menunjukkan bahwa inisiatif tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal pencegahan dini dan adaptasi terhadap dinamika sosial yang cepat berubah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan termasuk penguatan kapasitas institusi pemerintah, pembentukan regulasi yang relevan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan efektivitas strategi ini. Penguatan kolaborasi antar stakeholder, pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan transparan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas. Pendekatan strategis harus fleksibel dan adaptif, mencakup aspek kultural, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi, promosi budaya damai, peningkatan infrastruktur sosial, serta pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan juga perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan strategi penanganan konflik sosial guna mencapai stabilitas wilayah yang diinginkan. Pemerintah Kota Bandung menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan strategi penanganan konflik sosial. Hambatan struktural seperti keterbatasan kapasitas institusional, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan anggaran serta sumber daya menjadi isu utama. Selain itu, resistensi dari masyarakat, kurangnya partisipasi, serta budaya kekerasan yang masih ada di sebagian masyarakat turut memperumit upaya penanganan konflik. Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa langkah strategis diperlukan.

Peningkatan kapasitas institusional melalui pelatihan dan penguatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi pengelolaan anggaran, menjadi prioritas. Promosi nilai-nilai perdamaian dan toleransi, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dengan strategi yang fleksibel, juga sangat penting. Peningkatan legitimasi pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan merupakan langkah krusial untuk menciptakan stabilitas wilayah yang diinginkan. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta dapat memperkuat upaya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam mendukung strategi Pemerintah Kota Bandung dalam menangani konflik sosial dan menciptakan stabilitas wilayah yang berkelanjutan.

Konflik sosial di Kota Bandung, yang sering dipicu oleh kesenjangan ekonomi, perbedaan budaya, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak terkait. Partisipasi ini menjadi kunci dalam mendukung strategi penanganan konflik sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah melibatkan masyarakat melalui berbagai program dialog, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses resolusi konflik. Namun, tantangan tetap ada, seperti memastikan inklusivitas dan representasi yang adil bagi semua kelompok masyarakat serta mengatasi resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang diusulkan mencakup penguatan keadilan sosial, pemberdayaan kelompok marginal, pembangunan koalisi antar kelompok, fasilitasi dialog dan mediasi, serta pengembangan program pendidikan konflik. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas wilayah yang berkelanjutan dan memperkuat peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam menjaga keharmonisan di Kota Bandung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang Sutrisna, Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Membangun Analisis Peradaban dengan Dunia Islam, 2020, hal 6.
- Agus Subagyo, Teroris(me) : Aktor dan Isu Global Abad XXI, Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 2
- Amirullah Haris Budiyono, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 114-122.
- Andreas Aryanto Ate, 2022. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Perang Suku Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri diakses dari : <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9420>
- Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 227.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

- 
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bentrok Penertiban PKL Dalem Kaum Bandung, Sejumlah Orang Luka-luka, Diakses dari :<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7103663/bentrok-penertiban-pkl-dalem-kaum-bandung-sejumlah-orang-luka-luka>.
- Damsar, Pengantar Sosiologi Konflik, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, hal. 52
- Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S., M.A., Pengantar Sosiologi Dasar, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011) 113
- Didi Krisna, 1993, Kamus Politik Internasional, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Endang Irianti, Ermaya Suradinata & Hyronimus Rowa (2019). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Vol 11 No 4, diakses dari :  
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/230>
- Fahrudin, Eka Suaib & Bahtiar Bahtiar (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Atas Penguasaan Lahan Antara Kelompok Masyarakat dan PT. Hengjaya Mineralindo di Kabupaten Morowali. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*. Vol 1 No 3, diakses dari :  
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/index>
- Fisher, R. J. (2001). *Method of third party intervention*. Dalam Berghof handbook for conflict transformation. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Galtung, Johan. (2007). Introduction: Peace by peaceful conflict transformation – the TRANSCEND approach. Dalam Charles Webel dan Johan Galtung (Eds). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Oxon: Routledge
- Ida Ruwida. 2020. Pandemi Covid-19 Memicu Konflik Sosial Horizontal dan Vertikal di Indonesia. [S2sosiologi.fisip.unair.ac.id](https://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id).  
<http://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id/pandemi-covid-19-memicu->

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

konflik sosial-horizantal-dan-vertikal-di-indonesia

- Kerusuhan Dago Elos Bandung: Dipicu Sengketa Lahan, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/15/190000865/kerusuhan-dago-elos-bandung-lbh-bandung--dipicu-sengketa-lahan-?page=all>.
- Miall, H. (2002). Resolusi damai konflik kontemporer. Jakarta: PTRaja Grafindo.
- Miller, C. E. (2005). A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies (2nd Ed). San Jose: University for Peace
- Pendapat Gillin & Gillin ini dikutip dari Lambang Triyono, Spiral Kekerasan Kolektif dan Konflik Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, halm. 41
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092.
- Rafi'udin dan Maman Abd. Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 77.
- Ridwan Ridwan, Bambang Wahyudi & Ningsih Susilawati, (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Potensi Konflik Antara Imigran Timur Tengah Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, Vol 5 No 1, diakses dari : <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/349>
- Sahrul Ari Irawan, Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K Rangga, Tubagus Hasanuddin & Yuniar Aviati Syarief (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 6 No 4, diakses dari: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2715>
- Sarlito W. Sarwono dkk, Psikologi Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hal. 171.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

Pers, 2013, halm. 29

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Alfabeta.2012.

Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, Kapita Selekta Hubungan Internasional, Bandung : Alfabeta, 2016, hal. 25.

Triton, Marketing Strategic (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), 12-15

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Vestergaard, Bjarne, Erik Helvard, dan Aase Rieck Sørensen . (2011). Conflict resolution – working with conflicts. Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution